



The role of socially inclusive special libraries in agricultural institutions to support regional development

Peran perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial dalam kelembagaan pertanian mendukung pembangunan daerah

Herwan Junaidi¹, Pudji Muljono², Yusman Syaukat³

¹Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Kementerian Pertanian

²Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

³Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

¹Jl. Ir. H. Juanda No.20, Bogor 16122

²Jl. Kamper, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor 16680

³Jl. Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor 16680

Article Info

Corresponding Author:

Herwan Junaidi

dang.iwan84@gmail.com

History:

Submitted: 14-09-2023

Revised: 13-06-2025

Accepted: 01-10-2025

Keyword:

special library; social inclusion; farmer empowerment; agricultural extension center; food security

Kata kunci:

perpustakaan khusus; inklusi sosial; pemberdayaan petani; balai penyuluhan pertanian; ketahanan pangan

Abstract

Introduction. Social Inclusion-Based Special Library (PKBIS) is a transformation of library services that places the community as an active subject in utilizing information to improve welfare. This study aims to analyze the role and effectiveness of PKBIS in empowering agricultural communities in two assisted locations, namely the Leuwiliang and Cibungbulang Agricultural Extension Centers (BPP), Bogor Regency.

Research Methods. The method used is a qualitative and quantitative survey involving 24 respondents, including service users, BPP managers, and PKBIS assistants. **Data analysis.** Data were analyzed using the Importance Performance Analysis (IPA) method to identify gaps between expectations and service performance.

Results. Shows that no service attribute reaches the maximum level of conformity (100%), with an average conformity of 82.11%. Attributes that require priority improvement are in the aspects of proposal assistance and strengthening farmer institutions. These findings emphasize the importance of strengthening mentoring strategies, preparing literacy materials based on local needs, and increasing the capacity of PKBIS managers.

Conclusion. The PKBIS at BPP Leuwiliang and Cibungbulang effectively empowers farming communities through information access and capacity building, although the average service conformity level is only 82.11%. Improvements are needed in proposal preparation assistance and strengthening farmer institutions to optimize the potential of PKBIS as a driver of regional development.

Abstrak

Pendahuluan. Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosial (PKBIS) merupakan transformasi layanan perpustakaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pemanfaatan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas PKBIS dalam pemberdayaan masyarakat pertanian di dua lokasi dampingan, yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Leuwiliang dan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Metode Penelitian. Metode yang digunakan adalah survei dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melibatkan 24 responden yang terdiri dari pengguna layanan, pengelola BPP, dan pendamping PKBIS.

Data analisis. Analisis data menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kinerja layanan.

Hasil. Menunjukkan bahwa tidak ada atribut layanan yang mencapai tingkat kesesuaian maksimal (100%), dengan rata-rata kesesuaian sebesar 82,11%. Atribut yang memerlukan prioritas perbaikan berada pada aspek pendampingan proposal dan penguatan kelembagaan tani. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan strategi pendampingan, penyusunan materi literasi berbasis kebutuhan lokal, serta peningkatan kapasitas pengelola PKBIS.

Kesimpulan. PKBIS di BPP Leuwiliang dan Cibungbulang berperan efektif dalam pemberdayaan masyarakat pertanian melalui akses informasi dan peningkatan kapasitas, meskipun tingkat kesesuaian layanan rata-rata baru mencapai 82,11%. Perbaikan diperlukan pada pendampingan penyusunan proposal dan penguatan kelembagaan tani agar potensi PKBIS sebagai penggerak pembangunan daerah dapat optimal.



Copyright © 2025 by
Berkala Ilmu Perpustakaan
dan Informasi

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the UGM Library and Archives.

 <https://doi.org/10.22146/bip.v21i2.9870>

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses transformasi yang disengaja, berkelanjutan, dan bertahap untuk meningkatkan kualitas kehidupan suatu wilayah (Kurniawati, 2020). Proses ini mencakup seluruh sektor, termasuk sektor pertanian yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional, terutama terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan komoditas pangan strategis (Isbah, 2016). Sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan 40,6 juta orang atau sekitar 29,96% dari total angkatan kerja nasional (BPS, 2021). Keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan (Ramlawati, 2020).

Menurut Kementerian Perdagangan, nilai ekspor sektor pertanian Indonesia pada Januari–November 2021 mencapai US\$ 3,83 miliar atau naik 4,1% dari tahun sebelumnya. Produk-produk seperti kopi, teh, dan rempah-rempah menjadi komoditas utama (Kemendag, 2021). Bahkan, pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap sektor ini, menunjukkan resiliensi yang tinggi (FAO, 2020). Tujuan utama pembangunan sektor pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui ketahanan pangan dan peningkatan daya saing. Hal ini selaras dengan misi Kementerian Pertanian RI dan tujuan ke-2 dari Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan (Kementerian Pertanian, 2021; UNDP, 2015).

Dalam konteks ini, perpustakaan khususnya perpustakaan berbasis inklusi sosial mendapatkan peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Bappenas menetapkan **Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (PBIS)** sebagai program prioritas nasional yang bertujuan untuk memperkuat literasi demi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Bappenas, 2018). Literasi yang dimaksud mencakup keterampilan kognitif untuk memahami, menginterpretasi, dan mengimplementasikan informasi guna

menciptakan aktivitas produktif dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Bondar, 2019). Studi internasional menegaskan bahwa perpustakaan memiliki peran sentral dalam memberdayakan komunitas pedesaan, memperluas inklusi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan akses informasi, sumber daya digital, dan program peningkatan keterampilan (Kumar & Singh, 2020). Bahkan, riset di Tiongkok menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perpustakaan umum di pedesaan, ketersediaan e-book, dan tenaga profesional secara signifikan berdampak positif terhadap ekonomi pertanian (Zhao et al., 2024).

Namun, kondisi sosial menunjukkan tantangan signifikan. Berdasarkan data BPS (2017), masih terdapat 27,7 juta penduduk miskin di Indonesia, dengan 62% di antaranya tinggal di pedesaan (Mochammad et al., 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pun menunjukkan penurunan peringkat dari 108 ke 113 dunia (UNDP, 2020), mengindikasikan perlunya pendekatan berbasis pemberdayaan, salah satunya melalui PBIS. Dalam lingkup Kementerian Pertanian, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) memainkan peran penting sebagai penyedia informasi pertanian yang mudah diakses petani dan penyuluh (PUSTAKA, 2020). Penelitian internasional mencatat bahwa PUSTAKA bertransformasi menjadi “maker space” yang mendorong kesadaran kewirausahaan, kreativitas, dan penyediaan layanan virtual untuk memperluas literasi pertanian di wilayah terpencil (Purwantini et al, 2023)

PKBIS memiliki signifikansi tinggi dalam mendukung pembangunan daerah karena mampu mengatasi keterbatasan akses informasi dan pendidikan nonformal di wilayah terpencil. Sebagai ruang literasi dan interaksi sosial, PKBIS dapat menjadi platform pengembangan kapasitas individu maupun komunitas, terutama dalam bidang pertanian, UMKM, dan kewirausahaan. Melalui pendekatan partisipatif, PKBIS memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis,

serta dukungan advokasi (Triningsih, 2019; Rachman et al., 2019). Studi lain menegaskan bahwa pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di institusi pertanian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah desa, penguatan kapasitas SDM, program promosi, serta penguatan kelembagaan dan regulasi (Sukaesih et al., 2024).

Selain itu, integrasi teknologi digital dalam layanan PKBIS juga memungkinkan peningkatan aksesibilitas informasi di tengah keterbatasan geografis dan infrastruktur. Hal ini mendorong efisiensi dalam penyebaran pengetahuan pertanian dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal (Nugroho & Handayani, 2021). PKBIS secara praktis juga memperkuat pencapaian SDGs melalui peran aktifnya dalam pendidikan inklusif, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (IFLA, 2018). Dampaknya dapat dilihat dalam peningkatan kualitas hidup, produktivitas ekonomi lokal, dan keterlibatan warga dalam pembangunan. Dampaknya dapat dilihat dalam peningkatan kualitas hidup, produktivitas ekonomi lokal, dan keterlibatan warga dalam pembangunan. Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengangkat peran PKBIS dalam kelembagaan pertanian yang belum banyak dikaji secara spesifik, sekaligus menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan literasi pertanian berbasis kearifan lokal, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi multipihak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perpustakaan Khusus dan Perannya dalam Kelembagaan Pertanian

Perpustakaan khusus adalah unit perpustakaan yang dirancang untuk memberikan layanan informasi yang sangat fokus dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang atau lembaga induknya (Perpusnas, 2025). Dalam konteks kelembagaan pertanian, perpustakaan khusus menjadi pusat penyimpanan dan penyebarluasan hasil riset, kebijakan, dan teknologi pertanian yang relevan bagi para pemangku kepentingan

seperti peneliti, penyuluh, petani, dan pengambil kebijakan. Peran strategis perpustakaan khusus tercermin dalam fungsinya sebagai simpul pengetahuan (*knowledge hub*) yang mendukung proses inovasi dan pengambilan keputusan berbasis data (Setyowati, 2020). Studi di India menunjukkan bahwa perpustakaan pertanian berkontribusi pada inovasi, pendidikan berkelanjutan dan transfer pengetahuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengentasan kelaparan dan ketahanan pangan (Tiwari & Sinha, 2023).

Konsep Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (PBIS)

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (PBIS) adalah pendekatan layanan perpustakaan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi yang inklusif, partisipatif, dan relevan secara kontekstual (IFLA, 2018). PBIS bertujuan untuk meningkatkan literasi, keterampilan hidup, dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat pedesaan (Perpusnas RI, 2019). Inklusi sosial dalam perpustakaan mendorong transformasi peran pustakawan dari penjaga koleksi menjadi fasilitator pembelajaran masyarakat (Rahmawati, 2020). Hasil penelitian internasional menunjukkan bahwa perpustakaan desa berbasis inklusi sosial mampu meningkatkan partisipasi komunitas dan kesejahteraan warga melalui layanan berbasis kebutuhan lokal (Puspitasari et al., 2022).

Kelembagaan Pertanian dalam Perspektif Pembangunan Daerah

Kelembagaan pertanian merupakan sistem sosial yang mengatur hubungan antaraktor dalam aktivitas pertanian, mencakup lembaga formal seperti dinas pertanian, balai penyuluhan, serta lembaga nonformal seperti kelompok tani dan koperasi (Saragih, 2010). Kekuatan kelembagaan sangat menentukan keberhasilan program pembangunan daerah,

terutama dalam hal penyebaran inovasi pertanian, pemberdayaan petani, dan pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan (Anantanyu, 2011). Penelitian internasional di Tanzania menunjukkan bahwa integrasi layanan informasi pertanian berbasis teknologi *hybrid* (USSD-Android) dapat memperkuat jaringan informasi di pedesaan sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian lokal (Mtebe et al., 2024).

Perpustakaan dan Literasi Informasi dalam Konteks Pedesaan

Literasi informasi merupakan kemampuan individu untuk mengenali kebutuhan informasi, mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis (ACRL, 2015). Dalam konteks pedesaan, literasi informasi menjadi elemen penting untuk pengambilan keputusan yang tepat, terutama dalam bidang pertanian seperti pemilihan benih, waktu tanam, hingga akses pasar. Namun, rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterbatasan infrastruktur informasi membuat masyarakat pedesaan rentan terhadap informasi yang tidak valid atau bahkan menyesatkan (Nuralita & Fitri, 2020). Studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa program *mobile hotspot* yang dipinjamkan perpustakaan dapat meningkatkan konektivitas digital, memperkuat jejaring sosial, dan memfasilitasi adopsi teknologi pertanian *modern* seperti penggunaan drone dan aplikasi cuaca (Strover et al., 2020).

Peran Teknologi Digital dalam Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosial

Transformasi digital telah membawa dampak besar terhadap pengelolaan perpustakaan, termasuk perpustakaan khusus. Pemanfaatan teknologi seperti perpustakaan digital, layanan daring, dan media sosial memungkinkan perpustakaan menjangkau masyarakat yang secara geografis terpencil (Darmawan et al., 2020). Dalam konsep inklusi sosial, teknologi digital bukan hanya alat bantu, melainkan

jembatan antara informasi dan masyarakat marjinal. *Platform* digital yang dikembangkan oleh PUSTAKA Kementerian Pertanian, seperti *e-Perpus*, *Open Access Repository*, dan layanan literasi virtual, menjadi contoh nyata bagaimana digitalisasi memperluas akses informasi pertanian. Studi internasional di Tanzania juga membuktikan bahwa teknologi informasi adaptif yang mengakomodasi pengguna *feature phone* maupun *smartphone* dapat meminimalkan kesenjangan digital di wilayah pedesaan (Mtebe et al., 2024)..

Perpustakaan Khusus sebagai Agen Pemberdayaan Gender dan Inklusi Sosial

Pemberdayaan perempuan menjadi aspek penting dalam pembangunan pedesaan, khususnya di sektor pertanian di mana banyak perempuan terlibat sebagai tenaga kerja informal. Perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial dapat menjadi ruang aman dan produktif bagi perempuan dalam memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan membangun jaringan sosial. Misalnya, program literasi finansial dan pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga telah berhasil dilakukan oleh beberapa perpustakaan daerah (Andayani, 2021). Studi kasus internasional di Belitung menunjukkan bahwa perpustakaan basis komunikasi dapat menjadi pusat edukasi lingkungan, pemberdayaan perempuan dan pelestarian ekosistem melalui kolaborasi dengan kelompok tani lokal (Yuliani et al., 2023).

Kolaborasi Multipihak dalam Penguatan PKBIS

Salah satu kunci keberhasilan implementasi PKBIS adalah keterlibatan multipihak (*multi-stakeholders*), baik dari sisi pemerintah, komunitas lokal, akademisi, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat koordinasi informasi dan aksi komunitas. Misalnya, kerja sama antara perpustakaan dengan dinas pertanian daerah dan universitas dapat menghasilkan modul pelatihan berbasis riset lokal yang kontekstual. Sektor swasta pun dapat berkontribusi melalui program

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam penyediaan sarana teknologi, pelatihan, atau pemasaran produk pertanian komunitas. Model kolaborasi seperti ini telah diterapkan oleh beberapa perpustakaan desa di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan hasil peningkatan produktivitas masyarakat (Puspitasari, 2022). Penelitian global menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi katalis penting dalam keberhasilan perpustakaan inklusif untuk mempercepat pembangunan pedesaan (Tiwari & Sinha, 2023).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta tinjauan lapangan dengan pendekatan perbandingan (komparatif) antara satu variabel atau lebih dengan satu waktu dan lokasi yang berbeda. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahapan seperti terlihat pada Gambar 1. Tahap awal dari penelitian ini adalah kegiatan identifikasi kegiatan PKBIS. Kegiatan identifikasi ini dilakukan melalui studi literatur, baik berupa naskah jurnal, laporan kegiatan, maupun artikel yang berkaitan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial maupun melalui observasi langsung di lapangan. Tahap kedua dari penelitian ini adalah penyusunan instrumen pengumpulan data. Instrumen berupa kuesioner sebagai bahan untuk wawancara terstruktur dengan target responden. Kuesioner terbagi dalam dua kelompok, yaitu profil dari responden serta penilaian terhadap tingkat kepentingan dan kepuasan terhadap kegiatan yang disusun dalam program PKBIS melalui skala likert. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12

Desember 2022 sampai 20 Februari 2023. Tahap akhir adalah melakukan analisa deskriptif kuantitatif terhadap data yang sudah dikumpulkan.

Analisa data dilakukan melalui lima tahapan secara berurutan yang dimulai dari deskripsi demografi responden, analisa tingkat kesesuaian dan kepuasan, perhitungan GAP antara kepentingan dan kepuasan, penghitungan *importance performance analysis* (IPA) dan terakhir adalah pengelompok setiap aspek dalam empat kuadran kartesius. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peran nyata dari program PKBIS model kelembagaan di BPP Cibungbulang dan BPP Leuwiliang mendukung pembangunan daerah.

Peran strategis program PKBIS diukur dengan analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) yang mengaitkan antara kepentingan (*importance*) suatu indikator (atribut) yang dimiliki obyek tertentu dengan kinerja (*performance*) berdasarkan persepsi dari pengguna. Menurut Brandt (2015) analisis IPA dapat digunakan dalam mengukur hubungan antara persepsi *customer* dan prioritas dari peningkatan kualitas jasa ataupun produk yang biasa dikenal sebagai *quadran analysis*. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, di mana responden dipilih secara sengaja berdasarkan keahlian atau keterkaitannya terhadap program PKBIS.

Pengumpulan data terkait penentuan strategi pengembangan program PKBIS dilakukan beberapa tahap yaitu tahap pertama diawali dengan diskusi dan wawancara dengan fasilitator kegiatan PKBIS, penyuluhan pendamping, ketua Gapoktan, dan Posluhdes. Tahap pertama bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) serta mencocokan faktor dengan kondisi kegiatan PKBIS di lokasi. Tahap kedua ini merupakan penilaian dari pemangku kebijakan untuk mengetahui faktor yang paling penting dalam program PKBIS dan merekomendasikan prioritas

tertinggi. Pemangku kebijakan memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan serta penetapan arah kebijakan lembaga. Keterlibatan aktif mereka memberikan perspektif makro yang menyeluruh terhadap keberhasilan program, termasuk bagaimana PKBIS dapat bersinergi dengan kebijakan pembangunan daerah dan sektor pertanian. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam alokasi sumber daya dan penguatan kelembagaan, pandangan dan dukungan pemangku kebijakan menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan serta pengembangan program PKBIS ke depan. Pemangku kebijakan yang memberikan penilaian terdiri dari Koordinator Penyuluhan BPP Cibungbulang, Kepala Desa Benteng, Ketua RW Desa Benteng, Ketua RT Desa Benteng, Koordinator Penyuluhan BPP Leuwiliang, Sekretaris Desa Leuwiliang, Kepala Desa Gunung Putri, Ketua RT Gunung Putri dan Lurah Balumbangjaya Kota Bogor.

Analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) digunakan untuk mengukur hubungan antara persepsi *customer* dan prioritas dari peningkatan kualitas jasa ataupun produk yang dapat dikenal sebagai *quadrant analysis* (Brandt 2015). Kinerja dan kepentingan konsumen diukur pada skala likert dengan menggunakan skor penilaian kinerja dan tingkat kepentingan konsumen berupa sangat tidak baik, tidak baik, baik dan sangat baik serta sangat tidak penting, tidak penting, penting dan sangat penting.

Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian adalah sebagai berikut:

$$TKi = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

Keterangan:

- TKi = Tingkat kesesuaian responden
- Xi = Skor penilaian kinerja
- Yi = Skor penilaian kepentingan

Kemudian menghitung nilai rata-rata kinerja dan tingkat kepentingan konsumen dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n}$$

Keterangan:

\bar{X} = Skor rata-rata tingkat kinerja

\bar{Y} = Skor rata-rata tingkat kepentingan

n = Jumlah data konsumen

Pada teknik ini, responden diminta untuk menilai kepentingan dan kinerja dari program PKBIS, kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja tersebut dianalisis pada *Importance Performance Matrix*, yang mana sumbu x mewakili kinerja sedangkan sumbu y mewakili kepentingan, sehingga diperoleh hasil berupa empat kuadran. Diagram kartesius digunakan untuk menggambarkan prioritas atribut-atribut perbaikan ke depan dan dapat memberikan panduan untuk formulasi strategi dengan perhitungan X_i dan Y_i . Hasil perhitungan nilai X_i dan Y_i digunakan sebagai pasangan koordinat beberapa titik yang memposisikan suatu dimensi pada diagram kartesius.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

PKBIS adalah program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan perpustakaan yang difokuskan bagi masyarakat, petani, penyuluhan dan *stakeholder*. Program ini merupakan implementasi transformasi layanan perpustakaan yang berorientasi kepada pengguna dengan mendekatkan koleksi perpustakaan pertanian agar dapat berdayaguna secara maksimal. Kegiatan ini berupa pengembangan layanan bagi pemustaka di luar institusi induk dengan beragam usia, profesi, dan lapisan masyarakat. Kegiatan perpustakaan yang langsung menyentuh ke masyarakat ini mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan kemampuan *kognitif* dan *skill* sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan melalui literasi pertanian.

Penetapan lokasi dan responden menggunakan metode *purposive random sampling*. Lokasi penelitian yang dipilih

adalah BPP yang selama ini sebagai lokasi pendampingan program PKBIS oleh PUSTAKA, yaitu BPP Leuwiliang dan BPP Cibungbulang. BPP Leuwiliang menjadi karena beberapa pertimbangan dan kriteria yaitu pada tahun 2021 mendapat bantuan fasilitas dari dana pengembangan alokasi khusus (DAK) berupa prasarana tv, LCD, komputer, ruang data dan informasi. Selain itu wilayah binaan BPP Leuwiliang merupakan sentra produksi manggis yang berskala ekspor. Pada tahun 2022 BPP Leuwiliang juga menjadi salah satu BPP yang mendapat bantuan DAK yang merupakan salah satunya untuk pengembangan demplot percontohan sekitar 90 m².

BPP Wilayah Leuwiliang terletak di Jl. Karelkel Km 1 No.14 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Bogor 16640. BPP Wilayah Leuwiliang merupakan salah satu BPP yang berada di sebelah Barat Kabupaten Bogor, dengan jarak menuju Ibukota Kabupaten (Cibinong) sejauh 39 Km. Kantor BPP Wilayah Leuwiliang memiliki lahan seluas 7.150 m² dengan bangunan kantor BPP seluas 350 m². Lahan percontohan meliputi lahan sawah seluas 5.500 m², lahan darat seluas 1.650 m² dan kolam ikan seluas 48 m². Di samping itu BPP Leuwiliang telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap antara lain; ruang perpustakaan, aula pertemuan, gedung UPT Dinas dan ruang data informasi yang telah dilengkapi dengan sarana komputer, LCD dan perlengkapan lain yang cukup memadai.

Sumber daya penyuluhan yang dimiliki BPP Leuwiliang tahun 2022 adalah berjumlah 20 orang yang terdiri atas; 8 orang penyuluhan PNS, 4 orang penyuluhan ASN-PPPK, dan 8 orang penyuluhan Tenaga Harian Lepas (THL). Wilayah kerja BPP wilayah Leuwiliang terdiri dari 4 kecamatan, meliputi: (1) Kecamatan Leuwiliang; (2) Kecamatan Leuwisadeng; (3) Kecamatan Nanggung; dan (4) Kecamatan Rumpin (BPP Leuwiliang, 2022). Wilayah Leuwiliang memiliki luas wilayah 34.634. ha, terdiri dari Sawah 7.154. ha dan Darat 27.483. ha. Jumlah penduduk per Oktober 2017 adalah 420.487 jiwa, terdiri dari Laki-laki 217.244 jiwa dan Perempuan 202.243 jiwa.

Sejumlah capaian hasil pendampingan program PKBIS di BPP Leuwiliang diantaranya, yaitu: a) pembinaan pengelolaan perpustakaan BPP Leuwiliang; b) bimbingan teknis pembuatan video interaktif bagi penyuluhan BPP; c) bimbingan teknis literasi informasi bagi penyuluhan BPP; 4) pembinaan pengelolaan perpustakaan POSLUHDES; 5) bimbingan teknis pascapanen manggis pada kelompok tani; 6) bimbingan teknis budidaya pala dengan teknik penyambungan entres pala pada kelompok tani; 7) advokasi pembuatan proposal alat mesin dan pertanian (Alsintan) ke Ditjen PSP Kementerian Pertanian; 8) advokasi pembuatan proposal koleksi buku ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusipda) provinsi Jawa Barat;

Sedangkan BPP Cibungbulang beralamat di Jalan Kapten Dasuki Bakri Km², Desa Cibatok 2 Kabupaten Bogor. Kantor BPP Cibungbulang berdiri diatas tanah seluas 1.460 m². Jumlah kelompok tani yang menjadi binaan BPP Cibungbulang ada 427 buah, terdiri atas 253 kelompok tani, 33 kelompok wanita tani, 54 kelompok tani ternak, 54 kelompok pembudidaya ikan, dan 31 kelompok tani kehutanan. Jumlah petani yang sudah menjadi Anggota Kelompok tani 6.235 orang. Sumber daya penyuluhan yang dimiliki BPP Cibungbulang tahun 2022 adalah berjumlah 41 orang yang terdiri atas; 21 orang penyuluhan PNS, 20 orang penyuluhan Tenaga Harian Lepas (THL). Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wilayah Cibungbulang terdiri dari 4 kecamatan, meliputi: (1) Kecamatan Cibungbulang; (2) Kecamatan Benteng; (3) Kecamatan Ciampea; dan (4) Kecamatan Tenjolaya (BPP Cibungbulang, 2022). Wilayah Leuwiliang memiliki luas wilayah 16.385 ha.

Capaian dari hasil pendampingan program PKBIS di BPP Cibungbulang diantaranya, yaitu: a) pembinaan pengelolaan perpustakaan BPP Cibungbulang; b) bimbingan teknis pembuatan video interaktif bagi penyuluhan BPP; 3) bimbingan teknis pemutuan infografis bagi penyuluhan BPP; 4) bimbingan teknis literasi informasi bagi penyuluhan BPP; 5) pembinaan pengelolaan perpustakaan POSLUHDES; 6) bimbingan

teknis budidaya dan teknik pengendalian HPT ubi celembu pada kelompok tani; 7) bimbingan teknis pascapanen ubi celembu pada kelompok tani; 8) advokasi pembuatan proposal alat mesin dan pertanian (Alsintan) ke Ditjen PSP Kementerian Pertanian; 9) advokasi pembuatan proposal koleksi buku ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusipda) provinsi Jawa Barat; 10) advokasi ke anggota DPRD Kabupaten Bogor terkait usulan proposal Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO); 11) advokasi draf kerjasama kelompok tani dengan pihak swasta (MoU); 12) fasilitasi kunjungan ke PUSTAKA, Mesum Tanah dan Pertanian; dan 13) fasilitasi kunjungan ke Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cigombong.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 24 orang terdiri dari pengguna, pengelola, pendamping PKBIS di lokasi, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat. Tabel 1 menunjukkan sebaran responden untuk setiap kelompok. Sedangkan pengumpulan data dilakukan menggunakan dua cara, yaitu FGD/*Focus Group discussion* dan wawancara mendalam dengan responden untuk mengisi kuesioner yang sudah disusun.

Analisa data dilakukan melalui lima tahapan secara beurutan. Analisa data dimulai dengan deskripsi demografi responden, analisa tingkat kesesuaian dan kepuasan, perhitungan GAP antara kesesuaian dan kepuasan, penghitungan *importance performance analysis* dan terakhir adalah pengelompok setiap aspek dalam empat kuadran kartesius. Aspek karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan dan frekuensi kunjungan ke perpustakaan. Hasil pengamatan terhadap demografi responden selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Umur responden diklasifikasikan ke dalam empat kelompok. Pertama adalah umur <35 tahun, kedua 36-45 tahun, ketiga 46-55 tahun dan keempat >56 tahun. Berdasarkan kategori tersebut, presentase responden yang pertama (29,17%) lebih besar dari kategori kedua (18,75%), ketiga (39,58%) dan keempat (12,50%). Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia tua. Selanjutnya pada tabel 2 dari total 48 responden ternyata perempuan lebih banyak yaitu sebanyak 31 orang (64,58%) dan 17 orang laki-laki (35,42%). Sebagian besar responden memiliki pekerjaan IRT sebanyak 20 orang (42,66%) dan sebanyak 2 orang (4,17%) sebagai tenaga honorer. Hal ini menunjukkan bahwa yang terlibat dalam program PKBIS sebagian besar adalah perempuan berprofesi sebagai IRT.

Tahap awal yang dilakukan adalah identifikasi kegiatan yang dilaksanakan melalui studi dokumen dan laporan yang ada serta diskusi dengan tenaga pendamping pelaksanaan kegiatan PKBIS. Kegiatan pada program PKBIS dikelompokkan dalam lima aspek, yaitu koleksi perpustakaan, literasi, bimbingan teknis, fasilitasi dan advokasi. Tabel 3 menyajikan detail kegiatan yang dilakukan pada program PKBIS sesuai dengan aspek pendekatan yang digunakan.

Tahap berikutnya adalah penyusunan instumen penelitian. Ada dua hal yang dinilai dalam penelitian ini, yaitu pentingnya kegiatan dan kesesuaian harapan dengan kenyataan yang ada. Analisa data dilakukan melalui lima tahapan secara beurutan. Analisa data dimulai dengan deskripsi demografi responden, analisa tingkat kesesuaian dan kepuasan, perhitungan GAP antara kesesuaian dan kepuasan, penghitungan *importance performance analysis* dan terakhir adalah pengelompok setiap aspek dalam empat kuadran kartesius.

Peran strategis program PKBIS diukur dengan analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) yang mengaitkan antara kepentingan (*importance*) suatu indikator (atribut) yang dimiliki obyek tertentu dengan kinerja (*performance*) berdasarkan persepsi dari pengguna. Menurut Brandt (2015) analisis IPA dapat digunakan dalam mengukur hubungan antara persepsi *customer* dan prioritas dari peningkatan kualitas jasa ataupun produk yang biasa dikenal sebagai *quadrant analysis*. Pengukuran nilai kinerja dan kepentingan konsumen diukur pada skala likert dengan menggunakan skor.

Berdasarkan Tabel 4 tersebut, diketahui bahwa dari tiga puluh tiga atribut yang diukur, nilai kesesuaianya masih dibawah 100 persen, hal ini menunjukkan kinerja program PKBIS belum memenuhi kebutuhan, kepentingan serta harapan dari pengguna. Tingkat kesesuaian antara tingkat kepuasan dan kepentingan diatas hasil terbesar yang didapatkan yaitu sebesar 91,24% dari (X14) yang termasuk kedalam kategori sangat baik yaitu terletak pada atribut kompetensi narasumber dalam menyampaikan materi, akan tetapi masih terdapat 8,76% *customer* yang menilai kinerja program PKBIS belum sesuai dengan keinginan atau harapan *customer*. Sedangkan tingkat kesesuaian terendah yaitu pada atribut X31 dan X32 yang memiliki hasil presentase tingkat kesesuaian sebesar 65,25%.

Langkah berikutnya adalah analisa senjang antara kesesuaian dan kepentingan dari masing-masing kegiatan. Hasil perhitungan nilai *Gap* tingkat kesesuaian untuk tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan dapat dilihat pada Tabel 4. Data pada Tabel 4 merupakan penghitungan nilai *gap* keseluruhan butir pertanyaan. Seluruh nilai *gap* bernilai negatif (-) yang berarti bahwa persepsi pengelola dan pengguna perpustakaan terhadap program PKBIS lebih rendah dibandingkan harapan pengelola dan pengguna. Diketahui bahwa nilai *gap* tertinggi dari tiga puluh tiga atribut model kelembagaan yang diukur terdapat pada aspek advokasi, hal ini menunjukkan kinerja program PKBIS belum memenuhi kebutuhan, kepentingan serta harapan dari pengguna. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tingkat *gap* paling tinggi terletak pada atribut pendampingan proposal studi banding dan yang kedua adalah atribut pendampingan draf kerjasama (MoU), hal ini ditunjukkan dengan nilai *gap* yang paling besar yaitu -1,23. Persepsi dari pengelola dan pengguna menyatakan bahwa perlu pendampingan yang lebih intensif dalam pembuatan proposal dan pembuatan perjanjian kerjasama dengan *offtaker*.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi tiap atribut dalam pelayanan terhadap program PKBIS berdasarkan tingkat kinerja

dan tingkat harapan. Analisis kuadran kepuasan menggunakan diagram kartesius. Namun sebelum menampilkan hasil pada diagram terlebih dahulu mengetahui tingkat persepsi dan harapan yang diperoleh dari rata-rata tiap tingkatan kepuasan atau persepsi (X) dan rata-rata tingkat kepentingan atau harapan (Y) kemudian data tersebut dijelaskan dalam diagram kartesius, sehingga diketahui letak kuadran tiap parameter keseluruhan.

Tahap terakhir adalah memetakan hasil dari IPA kedalam diagram kartesius. Hal ini digunakan untuk menetapkan skala prioritas untuk penyusunan kegiatan dalam program PKBIS kedepan. Gambar diagram kartesius untuk tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengelola dan penguna perpustakaan dari program PKBIS tersaji pada Gambar 2.

Kuadran I: atribut-atribut yang berada di kuadran I merupakan atribut yang dianggap penting oleh responden. Namun, kinerja yang diterima dalam pelaksanaannya dinilai kurang oleh konsumen. Atribut-atribut tersebut adalah (13) kesesuaian materi literasi yang disampaikan narasumber bagi masyarakat; (14) kompetensi narasumber dalam menyampaikan materi; (15) pelatihan teknik budidaya; (16) pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman; (17) pelatihan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian; (18) workshop/ pelatihan PKBIS; (20) kesesuaian pelatihan bagi masyarakat dengan kebutuhan; (21) narasumber pelatihan masyarakat kompeten; (25) narasumber; (27) fasilitasi kegiatan sangat dirasakan manfaatnya; dan (28) pendampingan proposal alsintan. Hal ini menunjukkan bahwa program PKBIS sudah melaksanakan atribut-atribut tersebut dengan baik sehingga kepuasan konsumen tercapai.

Kuadran II: atribut-atribut yang berada di kuadran ini merupakan atribut yang dianggap penting oleh responden dan kinerja yang diterima dalam pelaksanaannya dinilai sudah sesuai dengan harapan konsumen. Atribut-atribut tersebut adalah (1) ketersediaan buku (pedoman, juknis); (6) kesesuaian koleksi yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat; (7) kualitas koleksi

yang ada di perpustakaan taman baca/ pojok baca; (8) kemutakhiran koleksi yang dimiliki perpustakaan taman baca/ pojok baca; (23) studi banding; (29) pendampingan proposal koleksi buku; (31) pendampingan proposal studi banding; dan (32) pendampingan draf kerjasama (MoU). Hal ini menunjukkan bahwa program PKBIS harus meningkatkan kinerja atribut-atribut yang berada di kuadran ini, karena harapan dari pengelola dan pengguna perpustakaan belum tercapai secara maksimal sehingga kepuasan konsumen yang diinginkan tercapai.

Kuadran III: atribut-atribut yang berada di kuadran ini merupakan atribut yang dianggap kurang penting oleh responden dan kinerja yang diterima dalam pelaksanaannya juga biasa saja. Atribut-atribut tersebut adalah (2) ketersediaan majalah (sinar tani, tribus, warta pertanian, agrina, info pertanian, pilar pertanian, ekstensia); (3) ketersediaan poster (teknologi pertanian); (5) ketersediaan CD/ DVD (teknologi pertanian); (10) teknik menulis ilmiah populer; (11) kesain infografis; (12) video interaktif; (24) webinar; dan (30) pendampingan proposal POCADI (Pojok Baca Digital). Hal ini menunjukkan bahwa program PKBIS harus meningkatkan kinerja dari atribut-atribut ini agar kepuasan konsumen tercapai.

Kuadran IV: atribut-atribut yang berada di kuadran ini merupakan atribut yang dianggap kurang penting oleh responden namun kinerja yang diterima dalam pelaksanaannya sudah sangat baik. Atribut-atribut tersebut adalah (4) ketersediaan leaflet/brosur (teknologi pertanian); (9) penelusuran informasi; (19) pengolahan koleksi perpustakaan; (22) Bimtek online/offline; (26) konsumsi; dan (33) kegiatan advokasi/ pendampingan sangat dirasakan manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa program PKBIS harus mempertahankan kinerja dari atribut-atribut ini, namun jangan terlalu berlebihan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan keempat kuadran kartesius, atribut yang harus diperbaiki terlebih dahulu ialah atribut yang berada pada kuadran I. Atribut pada kuadran I ini dianggap penting oleh pengguna akan tetapi belum sesuai

dengan kenyataannya, sehingga tingkat kepuasan yang didapatkan rendah. Hasil analisis pada diagram kartesius (Gambar 2), selanjutnya berfungsi untuk memetakan strategi pengembangan program PKBIS. Penentuan prioritas pengembangan pun dapat mengacu pada makna dari setiap kuadran.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial lembaga pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Peran aktif sebagai tempat untuk pertukaran informasi, perpustakaan pertanian memberi para pemangku kepentingan akses ke teknik pertanian yang penting, meningkatkan hasil, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wojciechowska (2021) yang menerangkan bahwa konsep modal sosial perpustakaan dapat berfungsi sebagai landasan utama dalam mengintegrasikan, menghidupkan, dan melibatkan masyarakat setempat.

Selain itu terdapat temuan dari Junaidi (2025), GAAP2 (2024) yang menyoroti advokasi MoU & proposal masih lemah sehingga perlu dibentuk tim fasilitasi proposal dan MoU terstruktur dengan SOP dan bimbingan intensif. Sedangkan CGIAR dan CABI (2024), menemukan emansipasi petani (gender-usia), perlu kembangkan modul pelatihan advokasi & literasi khusus perempuan dan penyuluh muda, catat indicator dan dampaknya. Arxiv (2025) yang menilai literasi informasi digital, perlu penambahan unit data community-managed, dokumentasi kegiatan PKBIS yang dikelola oleh petani/penyuluh. Sedangkan Singh & Kumari (2024) desain adaptif & desain program, perlu diterapkannya pendekatan PDCA lokal: evaluasi rutin oleh komite petani dan sesuaikan materi pelatihan setiap semester. Hal ini mendukung pengembangan kapasitas lokal dan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan pangan di sektor pertanian, yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosial (PKBIS) di BPP Leuwiliang dan BPP Cibungbulang berperan strategis dan cukup

efektif dalam pemberdayaan masyarakat pertanian melalui layanan literasi, bimbingan teknis, fasilitasi, dan advokasi yang mendorong peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan jejaring kelembagaan petani. Rata-rata tingkat kesesuaian layanan sebesar 82,11% menunjukkan kinerja yang baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna. Temuan baru dari penelitian ini mengungkap perlunya pembentukan tim fasilitasi proposal dan MoU yang terstruktur dengan SOP, pengembangan modul advokasi dan literasi khusus bagi perempuan serta penyuluh muda, dan penambahan unit data berbasis komunitas yang dikelola langsung oleh petani/penyuluh. Selain itu, disarankan penerapan pendekatan PDCA lokal melalui evaluasi rutin oleh komite petani dan penyesuaian materi pelatihan setiap semester. Implementasi strategi ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan, ketahanan pangan, dan peran PKBIS sebagai penggerak pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan kemandirian petani.

Saran

Program PKBIS perlu diarahkan pada pendampingan yang lebih sistematis dalam penyusunan proposal, baik untuk pengadaan alsintan, koleksi buku, Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO), maupun kegiatan studi banding. Pelatihan khusus mengenai negosiasi dan penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan *off taker*, pemerintah daerah, dan pihak swasta menjadi penting untuk memperkuat jejaring kemitraan. Pembentukan tim fasilitator PKBIS berbasis lintas sektor yang melibatkan penyuluh, pustakawan, praktisi hukum, dan tenaga ahli CSR. Peningkatan kapasitas juga dapat dilakukan melalui pelatihan lanjutan produksi video, infografis, dan media interaktif berbasis kebutuhan lokal, serta pemanfaatan platform digital seperti Pojok Baca Digital (POCADI), *e-learning* pertanian, dan media sosial. Dukungan konektivitas dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat dioptimalkan melalui skema pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendekatan program PKBIS dapat dikembangkan berbasis segmentasi sasaran. Penyusunan modul khusus untuk ibu rumah tangga (IRT) yang memuat literasi keuangan rumah tangga tani dan pengolahan pangan lokal, serta modul untuk petani muda yang berfokus pada pemasaran digital, *e-commerce* produk pertanian, dan pertanian presisi.

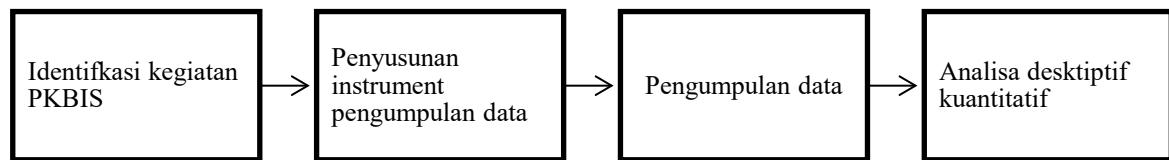
DAFTAR PUSTAKA

- ACRL. (2015). *Framework for information literacy for higher education*. Association of College and Research Libraries. <https://www.ala.org/acrl/standards/ilframework>
- Andayani, L. (2021). Pemberdayaan perempuan melalui layanan literasi berbasis inklusi sosial di perpustakaan desa. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 10(2), 123–133.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. (2018). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas RI.
- Bondar, I. (2019). Literasi untuk kesejahteraan: Pendekatan inklusi sosial dalam pengembangan perpustakaan. *Jurnal Kepustakawan dan Informasi*, 5(1), 10–20.
- Badan Pusat Statistik RI. (2017). *Profil kemiskinan di IndoensiaMaret 2017*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik RI. (2021). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021*. BPS RI.
- CGIAR GENDER Platform (2024). Integrating social inclusion in agri-food systems research: A methodological framework. CGIAR Working Paper, May 2024.
- Darmawan, A., Santosa, H., & Suryanto, Y. (2020). Peran teknologi informasi dalam transformasi layanan perpustakaan berbasis digital. *Jurnal Pustaka Digital*, 8(1), 45–56.
- Food and Agriculture Organization. (2020). *FAO policy brief: COVID-19 and the impact on agriculture*. FAO.

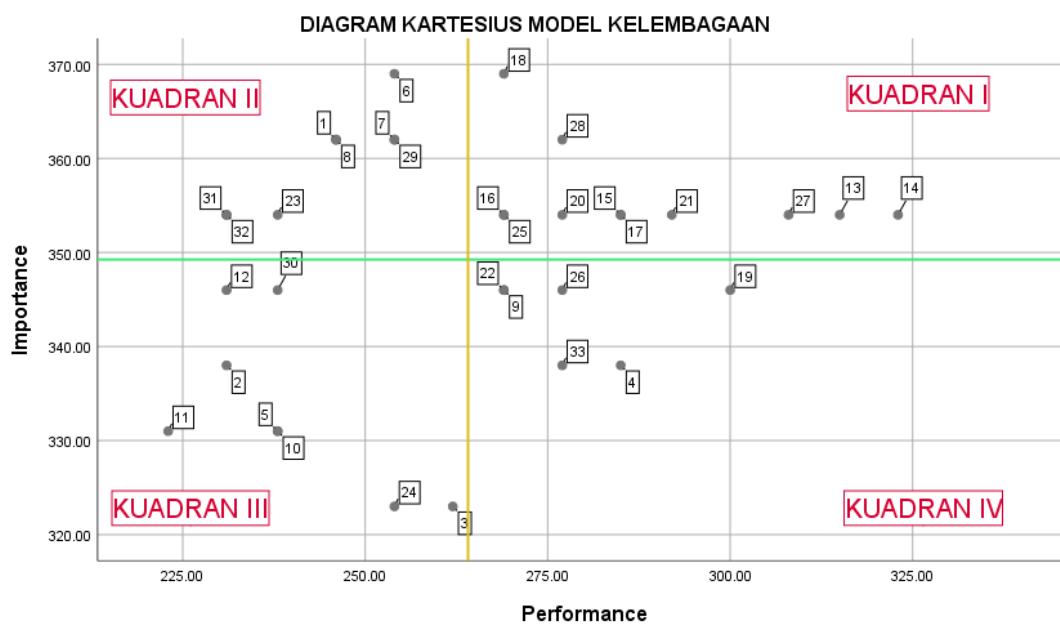
- GAAP2 – Gender & Agriculture Partnership (2024). Enhancing agency and empowerment in agricultural development projects: Evidence from multi-country analysis. *Journal of Rural Studies*, 103, 1–15.
- IFLA. (2018). *Libraries and the Sustainable Development Goals: A Storytelling Manual*. International Federation of Library Associations and Institutions.
- Isbah, M. (2016). Pertanian dalam pembangunan nasional: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(2), 89–102.
- Junaidi, H., et al. (2025). Strategi perpustakaan inklusif di lembaga pertanian. Kajian SWOT-AHP pada program PKBIS. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 13(1), 1-18. <https://doi.org/10.24198/jkip.v13i1.50312>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Komoditas Pertanian 2021*. Kementerian Perdagangan RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). *Strategi Kementerian Pertanian dalam Mendukung SDGs 2030*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kumar, P., & Singh, R. (2020). Social inclusion through rural libraries: A pathway to sustainable development. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 7(6), 456–462.
- Kurniawati, D. (2020). Pembangunan berkelanjutan: Teori dan praktik dalam konteks lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(1), 1–14.
- Mochammad, Y., Rachmawati, E., & Sumardjo, M. (2020). Strategi pengentasan kemiskinan berbasis literasi informasi di pedesaan. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 55–64.
- Mtebe, J. S., Pima, J. M., & Sam, A. (2024). eKichabi v2: A hybrid USSD–Android agricultural directory for rural communities in Tanzania. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.09980>
- Nugroho, Y., & Handayani, R. (2021). Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan layanan literasi pertanian. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 6(3), 212–225.
- Nuralita, L., & Fitri, Y. (2020). Literasi informasi di masyarakat pedesaan: Peran perpustakaan sebagai agen perubahan. *Jurnal Komunikasi dan Literasi*, 4(1), 66–74.
- Perpusnas RI. 2022. Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Peraturan Perpusnas No. 7 tahun 2022. <https://peraturan.go.id/id/perpusnas-no-14-tahun-2017>
- Puspitasari, M. (2022). Kolaborasi multipihak dalam penguatan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. *Jurnal Pustaka Masyarakat*, 2(2), 109–120.
- PUSTAKA. (2020). *PUSTAKA siap berpartisipasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik*. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. <https://pustaka.bppsdmp.pertanian.go.id/index-berita/pustaka-siap-berpartisipasi-pada-kompetisi-inovasi-pelayanan-publik>
- Purwantini, A., Wulandari, D., & Santoso, A. (2021). Transformasi layanan informasi pertanian berbasis inklusi sosial. *Jurnal Pustaka Pertanian*, 1(2), 45–55.
- Puspitasari, N. (2022). Kolaborasi multipihak dalam penguatan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. *Jurnal Pustaka Masyarakat*, 6(2), 55–68.
- Rachman, A., Sari, L., & Ningsih, E. (2019). Model pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan berbasis komunitas. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 67–78.
- Ramlawati. (2020). Desentralisasi pembangunan daerah: Kunci keberhasilan pembangunan nasional. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, 12(2), 150–160.
- Singh, R. & Kumari, N. (2024). Community-based rural empowerment strategies: Leadership and adaptability as drivers of sustainability. *International Journal of*

- Sociology and Humanities*, 12(2), 88–102.
- Strover, S., Whitacre, B., Rhinesmith, C., & Schrubbe, A. (2020). The digital inclusion role of rural libraries: Social inequalities through space and place. *Media, Culture & Society*, 42(2), 242–259.
<https://doi.org/10.1177/0163443719853504>
- Tiwari, P., & Sinha, R. (2023). Role of agriculture libraries in advancing Sustainable Development Goals: A study in Indian perspective. *Library Philosophy and Practice*, 1–15.
- Triningsih, H. (2019). Peran perpustakaan dalam penguatan kapasitas masyarakat desa. *Jurnal Inklusi Sosial dan Literasi*, 2(1), 34–47.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
<https://sdgs.un.org/2030agenda>
- UNDP (United Nations Development Programme). 2020. Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. New York
- Yuliani, F., Hidayah, N., & Saputra, H. (2023). Literacy House Mangrove Library: A case study of social inclusion in environmental literacy. *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 11(1), 32–45.
<https://doi.org/10.24252/kah.v11i1.36383>

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 Metodologi penelitian



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 2 Diagram kartesius model kelembagaan

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran responden

No	Kelompok responden	BPP Leuwiliang	BPP Cibungbulang
1	Pengguna	5	4
2	Pengelola	1	3
3	Pendamping PKBIS	1	1
4	Pemangku kepentingan	3	3
5	Tokoh masyarakat	1	2
Jumlah		11	13

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Tabel 2 Karakteristik responden pengelola dan pengguna perpustakaan

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Usia	< 35	6	6,00
	36-45	8	7,92
	46-55	8	7,92
	> 56	2	2,16
Jenis kelamin	Lak-laki	18	75,00
	Perempuan	6	25,00
Tingkat pendidikan	SD	0	0
	SLTP	1	0,96
	SMA	7	7,20
	D1/D3	1	0,96
	D4/S1	14	13,92
Pekerjaan	ASN	12	12,00
	Pegawai swasta	2	1,92
	Wiraswasta	7	7,20
	Honorer	2	1,92
	Pelajar/Mahasiswa	0	16,67
Frekuensi	IRT	1	0,96
	1-2	5	5,04
	3-5	6	6,00
	>5	13	12,96

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Tabel 3 Detail atribut/kegiatan untuk setiap aspek kegiatan

No.	Kode atribut	Aspek/Atribut
Aspek Koleksi Perpustakaan		
1	X1	Ketersediaan buku (pedoman, juknis)
2	X2	Ketersediaan majalah (sinar tani, trubus, warta pertanian, agrina, info pertanian, pilar pertanian, ekstensia)
3	X3	Ketersediaan poster (teknologi pertanian)
4	X4	Ketersediaan leaflet/brosur (teknologi pertanian)
5	X5	Ketersediaan CD/ DVD (teknologi pertanian)
6	X6	Kesesuaian koleksi yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat
7	X7	Kualitas koleksi yang ada di perpustakaan taman baca/ pojok baca
8	X8	Kemutakhiran koleksi yang dimiliki perpustakaan taman baca/ pojok baca
Aspek Literasi Pertanian		
9	X9	Penelusuran informasi
10	X10	Teknik menulis ilmiah populer
11	X11	Desain infografis
12	X12	Video interaktif
13	X13	Kesesuaian materi literasi yang disampaikan narasumber bagi masyarakat
14	X14	Kompetensi narasumber dalam menyampaikan materi
Aspek Bimbingan Teknis		
15	X15	Pelatihan teknik budidaya
16	X16	Pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman
No.	Kode atribut	Aspek/Atribut
Aspek Koleksi Perpustakaan		
17	X17	Pelatihan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian
18	X18	Workshop/ pelatihan PKBIS
19	X19	Pengolahan koleksi perpustakaan
20	X20	Kesesuaian pelatihan bagi masyarakat dengan kebutuhan
21	X21	Narasumber pelatihan masyarakat kompeten
Aspek Fasilitasi		
22	X22	Bimtek online/ offline
23	X23	Studi banding
24	X24	Webinar
25	X25	Narasumber
26	X26	Konsumsi
27	X27	Fasilitasi kegiatan sangat dirasakan manfaatnya
Aspek Advokasi		
28	X28	Pendampingan proposal alsintan
29	X29	Pendampingan proposal koleksi buku
30	X30	Pendampingan proposal POCADI (Pojok Baca Digital)
31	X31	Pendampingan proposal studi banding
32	X32	Pendampingan draf kerjasama (MoU)
33	X33	Kegiatan Advokasi/ Pendampingan sangat dirasakan manfaatnya

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Tabel 4 Tingkat kesesuaian

No.	Tingkat Kepuasan (Xi)	Tingkat Kepentingan (Yi)	Tingkat Kesesuaian (TKi)	GAP Score
Aspek Koleksi Perpustakaan				
X1	2,46	3,62	67,96%	-1,15
X2	2,31	3,38	68,34%	-1,08
X3	2,62	3,23	81,11%	-0,62
X4	2,85	3,38	84,32%	-0,54
X5	2,38	3,31	71,90%	-0,92
X6	2,54	3,69	68,83%	-1,15
X7	2,54	3,62	70,17%	-1,08
X8	2,46	3,62	67,96%	-1,15
Aspek Literasi Pertanian				
X9	2,69	3,46	77,75%	-0,77
X10	2,38	3,31	71,90%	-0,92
X11	2,23	3,31	67,37%	-1,08
X12	2,31	3,46	66,76%	-1,15
X13	3,15	3,54	88,98%	-0,38
X14	3,23	3,54	91,24%	-0,31
Aspek Bimbingan Teknis				
X15	2,85	3,54	80,51%	-0,69
X16	2,69	3,54	75,99%	-0,85
X17	2,85	3,54	80,51%	-0,69
X18	2,69	3,69	72,90%	-1,00
X19	3,00	3,46	86,71%	-0,46
X20	2,77	3,54	78,25%	-0,77
X21	2,92	3,54	82,49%	-0,62
Aspek Fasilitasi				
X22	2,69	3,46	77,75%	-0,77
X23	2,38	3,54	67,23%	-1,15
X24	2,54	3,23	78,64%	-0,69
X25	2,69	3,54	75,99%	-0,85
X26	2,77	3,46	80,06%	-0,69
X27	3,08	3,54	87,01%	-0,46
Aspek Advokasi				
X28	2,77	3,62	76,52%	-0,85
X29	2,54	3,62	70,17%	-1,08
X30	2,38	3,46	68,79%	-1,08
X31	2,31	3,54	65,25%	-1,23
X32	2,31	3,54	65,25%	-1,23
X33	2,77	3,38	81,95%	-0,62

Sumber: Data diolah (2023)